TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Vol. 7 No. 4 (2026): Social and Government
DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v7i4.1150 Hal. 428-451

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI RUANG LITERASI KEWARGANEGARAAN: INTEGRASI LITERASI INFORMASI DAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MAHASISWA DI ERA DIGITAL

Ketut Ayu Sanjiwani
Afiliasi: Universitas Udayana
Email Korespondensi: ayusanjiwani@unud.ac.id

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah cara mahasiswa mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dalam kehidupan akademik maupun sosial. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi peningkatan pengetahuan, namun juga memunculkan tantangan berupa misinformasi, disinformasi, polarisasi, dan rendahnya kemampuan kritis dalam menilai kredibilitas informasi. Dalam konteks tersebut, literasi kewarganegaraan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai kemampuan mengelola informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran potensial perpustakaan perguruan tinggi sebagai ruang literasi kewarganegaraan melalui integrasi literasi informasi dan nilai-nilai Pancasila di era digital. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020. Analisis dilakukan secara tematik terhadap literatur terkait perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, literasi kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, literasi digital, dan keterlibatan warga negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi aspek-aspek tersebut dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi Indonesia masih terbatas. Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menempatkan perpustakaan sebagai ruang civic learning melalui proses akses informasi kredibel, evaluasi informasi, pemahaman isu publik, internalisasi nilai Pancasila, dan penguatan partisipasi kewarganegaraan.

Kata Kunci: Perpustakaan Perguruan Tinggi, Literasi Informasi, Pendidikan Pancasila, Literasi Digital, Partisipasi Kewarganegaraan

Abstract: *Digital transformation has changed the way university students access, evaluate, and use information in academic and social contexts. The advancement of information technology provides significant opportunities for knowledge development while also creating challenges such as misinformation, disinformation, polarization, and limited critical ability to assess information credibility. In this context, civic literacy should be developed not only as an understanding of citizens' rights and responsibilities but also as the ability to manage information critically, ethically, and responsibly. This study aims to analyze the potential role of academic libraries as civic literacy spaces through the integration of information literacy and Pancasila values in the digital era. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method guided by PRISMA 2020. Thematic analysis was conducted on literature related to academic libraries, information literacy, civic literacy, Pancasila education, digital literacy, and civic engagement. The findings indicate that the integration of these dimensions within Indonesian academic libraries remains limited. This study proposes a conceptual model that positions academic libraries as civic learning spaces through a process of accessing credible information, evaluating information, understanding public issues, internalizing Pancasila values, and strengthening civic participation.*

Keywords: *Academic Library, Information Literacy, Pancasila Education, Digital Literacy, Civic Participation*

Article History :
Received 10-10-2026; Revised 25-10-2026; Accepted 14-11-2026

PENDAHULUAN

Era digital telah melahirkan generasi digital native yang terpapar jutaan konten setiap harinya. Fenomena banjir informasi (information overload) menghadirkan ancaman serius berupa disinformasi, hoaks, dan propaganda yang dapat merusak tatanan sosial dan moral mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa. Tanpa bekal literasi informasi yang kuat, mahasiswa rentan terjerumus dalam lingkaran konsumsi konten yang tidak terverifikasi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam ekosistem informasi perguruan tinggi. Mahasiswa saat ini dapat memperoleh informasi melalui mesin pencari, media sosial, portal berita, platform video, repositori digital, dan berbagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Perubahan tersebut memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan secara cepat dan luas. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan baru karena tidak seluruh informasi yang tersedia di ruang digital memiliki kredibilitas dan validitas yang memadai.

Urgensi penguatan literasi informasi bukan sekadar kebutuhan akademik, melainkan benteng pertahanan etika dan moral di ruang digital. Perguruan tinggi, khususnya melalui perpustakaan sebagai jantung akademik, memiliki tanggung jawab strategis untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan kritis dalam menyaring, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara. Mahasiswa tidak hanya berhadapan dengan banyaknya informasi, tetapi juga harus menghadapi misinformasi, disinformasi, manipulasi informasi, ujaran kebencian, polarisasi, dan konten yang berpotensi memengaruhi cara pandang terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan. Dalam kehidupan demokratis, persoalan tersebut menjadi penting karena kualitas partisipasi warga negara sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang digunakan dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi secara tepat merupakan bagian dari literasi informasi. Association of College and Research Libraries (ACRL) menempatkan otoritas informasi, proses penciptaan informasi, nilai informasi, penelitian sebagai proses pencarian, scholarship as conversation, dan searching as strategic exploration sebagai kerangka penting dalam literasi informasi perguruan tinggi. Kerangka tersebut membuka ruang kolaborasi antara pustakawan, dosen, dan institusi dalam mengembangkan kemampuan literasi mahasiswa. Dalam konteks kewarganegaraan, kemampuan tersebut memiliki makna yang lebih luas. Literasi kewarganegaraan atau civic literacy tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang negara, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga kemampuan memahami persoalan publik, berpikir kritis, berdialog dengan perbedaan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Penelitian mengenai civic literacy mahasiswa di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan reflektif, kemampuan analitis, dan partisipasi kewarganegaraan mahasiswa. Kajian terbaru bahkan menekankan perlunya mengembangkan lingkungan kampus sebagai civic learning space melalui dialog, debat, aktivitas mahasiswa, dan keterlibatan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan civic literacy tidak semata-mata menjadi tanggung jawab mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan. Lingkungan akademik secara keseluruhan perlu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi yang kredibel, mengembangkan pemikiran kritis, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Pada titik inilah perpustakaan perguruan tinggi memiliki posisi strategis. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menempatkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang berfungsi mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, secara normatif perpustakaan memiliki landasan yang kuat untuk berkontribusi dalam pembentukan warga negara.

Perpustakaan perguruan tinggi selama ini lebih sering diposisikan sebagai pusat sumber informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian. Perspektif tersebut tetap penting, tetapi perkembangan lingkungan informasi digital menunjukkan bahwa fungsi perpustakaan perlu diperluas. Perpustakaan tidak cukup hanya menyediakan sumber informasi, tetapi juga perlu membantu mahasiswa memahami bagaimana informasi diproduksi, siapa yang memiliki otoritas terhadap informasi tersebut, bagaimana informasi dievaluasi, serta bagaimana informasi digunakan secara etis.

Kajian internasional telah menunjukkan bahwa pustakawan akademik memiliki peluang untuk berperan dalam pengembangan civic literacy dan civic engagement. Bahkan kajian tahun 2024 menyerukan agar perpustakaan tidak hanya mengembangkan literasi informasi untuk keberhasilan akademik dan karier, tetapi juga mengembangkan kompetensi yang diperlukan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang civic literacy mahasiswa juga berkembang. Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis Pancasila dapat dikaitkan dengan civic literacy, kesadaran politik, dan partisipasi demokratis mahasiswa. Penelitian tahun 2026 juga menunjukkan bahwa revitalisasi Pendidikan Pancasila membutuhkan pendekatan dialogis, transformatif, dan partisipatif serta lingkungan kampus yang mendukung pembelajaran kewarganegaraan.

Namun, terdapat persoalan yang belum banyak dikaji. Kajian tentang perpustakaan umumnya berfokus pada literasi informasi, penggunaan sumber digital, layanan perpustakaan, dan kemampuan pencarian informasi. Sebaliknya, kajian civic literacy lebih banyak berfokus pada pembelajaran Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, kesadaran politik, dan partisipasi demokratis. Dengan kata lain, perpustakaan sebagai institusi informasi belum banyak ditempatkan secara eksplisit sebagai ruang pembentukan literasi kewarganegaraan berbasis nilai Pancasila di perguruan tinggi Indonesia. Celah tersebut menjadi semakin penting dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan. Mahasiswa kini dapat menghasilkan teks, mencari informasi, dan memperoleh jawaban dengan sangat cepat melalui teknologi AI. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan mengevaluasi sumber, memeriksa kebenaran informasi, memahami konteks, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana perpustakaan perguruan tinggi dapat dikembangkan sebagai ruang literasi kewarganegaraan melalui integrasi literasi informasi dan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa di era digital? Penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya mengintegrasikan empat komponen yang selama ini lebih sering dikaji secara terpisah, yaitu perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, civic literacy, dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan sekadar dasar negara yang tertulis dalam naskah konstitusi, melainkan merupakan sistem nilai hidup yang relevan sepanjang masa termasuk di era digital yang penuh tantangan moral. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan memberikan panduan etis bagi mahasiswa dalam bersikap, berkomunikasi, dan berkreasi di ruang daring. Di tengah maraknya individualisme digital dan polarisasi opini di media sosial, Pancasila hadir sebagai kompas moral yang menyeimbangkan kreativitas dengan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai Pancasila mendorong mahasiswa untuk menghindari ujaran kebencian, menghormati keberagaman, serta aktif berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial melalui konten yang edukatif dan positif.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian mengenai perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, *civic literacy*, dan pendidikan Pancasila dalam konteks era digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara literasi informasi dan pengembangan literasi kewarganegaraan mahasiswa, serta menganalisis potensi perpustakaan perguruan tinggi sebagai *civic learning space* yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kritis, etis, dan demokratis. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual integrasi literasi informasi dan nilai-nilai Pancasila dalam penguatan *civic literacy* mahasiswa, sehingga perpustakaan perguruan tinggi dapat berperan dalam membentuk mahasiswa yang mampu mengevaluasi informasi secara kritis, memahami isu publik, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan di era digital.

Era digital telah melahirkan generasi *digital native* yang terpapar berbagai informasi melalui mesin pencari, media sosial, portal berita, platform video, repositori digital, dan aplikasi berbasis

kecerdasan buatan. Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan secara cepat dan luas. Namun, tingginya arus informasi (*information overload*) juga menghadirkan tantangan berupa misinformasi, disinformasi, hoaks, propaganda, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Tanpa kemampuan literasi informasi yang memadai, mahasiswa berisiko menerima dan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Madani et al. (2025) menjelaskan bahwa penguatan literasi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi perkembangan misinformasi di lingkungan digital. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap kualitas pembelajaran akademik, tetapi juga dapat memengaruhi pembentukan sikap, moral, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan.

Penguatan literasi informasi tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga bagian penting dalam membangun tanggung jawab etis di ruang digital. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Association of College and Research Libraries (2016) menempatkan otoritas informasi, proses penciptaan informasi, nilai informasi, penelitian sebagai proses pencarian, *scholarship as conversation*, dan *searching as strategic exploration* sebagai enam kerangka penting dalam pengembangan literasi informasi di perguruan tinggi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa literasi informasi tidak sekadar berkaitan dengan keterampilan mengakses sumber, tetapi juga kemampuan memahami kredibilitas, konteks, dan penggunaan informasi secara etis.

Dalam konteks kewarganegaraan, kemampuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan *civic literacy* atau literasi kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai negara, konstitusi, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga kemampuan memahami persoalan publik, berpikir kritis, menghargai perbedaan, berdialog, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Tiara et al. (2024) menekankan pentingnya penguatan *civic literacy* dalam membangun kompetensi dan ketahanan kewarganegaraan. Sementara itu, Muhajir et al. (2025) menunjukkan relevansi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat literasi digital dan budaya politik generasi muda di perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan *civic literacy* membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan tidak terbatas pada pembelajaran formal di ruang kelas, tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan akademik secara keseluruhan.

Salah satu institusi yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan tersebut adalah perpustakaan perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menempatkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang berfungsi mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Landasan tersebut memberikan ruang bagi perpustakaan untuk berkontribusi dalam pembentukan literasi kewarganegaraan. Selama ini, perpustakaan perguruan tinggi lebih sering diposisikan sebagai pusat penyedia sumber informasi untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Padahal, perkembangan ekosistem informasi digital menuntut perluasan peran perpustakaan, tidak hanya menyediakan sumber informasi, tetapi juga membimbing mahasiswa dalam mengevaluasi kredibilitas informasi, memahami proses produksi pengetahuan, serta menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab.

Kranich (2024) menjelaskan bahwa perpustakaan memiliki potensi strategis dalam mengembangkan literasi kewarganegaraan dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokratis. Peran tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga dapat menjadi ruang pengembangan kompetensi yang diperlukan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dalam konteks Indonesia, penelitian Muhajir et al. (2025) memperlihatkan pentingnya pembelajaran berbasis Pancasila dalam memperkuat literasi digital dan budaya politik mahasiswa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan literasi kewarganegaraan membutuhkan pendekatan yang lebih luas melalui pembelajaran, penyediaan informasi, dan lingkungan kampus yang mendukung sikap kritis serta partisipatif.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dalam pengembangan kajian tersebut. Penelitian mengenai perpustakaan perguruan tinggi umumnya lebih berfokus pada literasi informasi, penggunaan sumber digital, layanan perpustakaan, dan keterampilan pencarian informasi. Sebaliknya, kajian *civic literacy* lebih banyak diarahkan pada pembelajaran Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, kesadaran politik, dan partisipasi demokratis. Dengan demikian, perpustakaan sebagai institusi

informasi belum banyak ditempatkan secara eksplisit sebagai ruang pembentukan literasi kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi Indonesia. Kesenjangan tersebut semakin relevan seiring perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dan menghasilkan informasi secara cepat, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan verifikasi sumber, penilaian kebenaran informasi, pemahaman konteks, dan tanggung jawab dalam pemanfaatannya.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan etis yang penting untuk diintegrasikan dalam pengembangan literasi kewarganegaraan. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mencari, mengolah, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi di ruang digital. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab, menghormati keberagaman, menghindari ujaran kebencian, serta memperkuat sikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi persoalan publik. Oleh karena itu, perpustakaan perguruan tinggi berpotensi dikembangkan sebagai *civic learning space* yang menghubungkan kemampuan literasi informasi dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana perpustakaan perguruan tinggi dapat dikembangkan sebagai ruang literasi kewarganegaraan melalui integrasi literasi informasi dan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa di era digital? Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengintegrasikan empat komponen yang selama ini lebih sering dikaji secara terpisah, yaitu perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, *civic literacy*, dan nilai-nilai Pancasila. Integrasi tersebut diarahkan untuk mengembangkan perspektif mengenai peran perpustakaan tidak hanya sebagai pusat penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kritis, etis, dan demokratis dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian mengenai perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, *civic literacy*, dan pendidikan Pancasila dalam konteks era digital. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi keterkaitan antara literasi informasi dan pengembangan literasi kewarganegaraan mahasiswa serta menganalisis potensi perpustakaan perguruan tinggi sebagai *civic learning space*. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan model konseptual integrasi literasi informasi dan nilai-nilai Pancasila dalam penguatan *civic literacy* mahasiswa. Melalui kajian tersebut, diharapkan perpustakaan perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam membentuk mahasiswa yang mampu mengevaluasi informasi secara kritis, memahami isu publik, serta berpartisipasi secara etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, civic literacy, pendidikan Pancasila, dan partisipasi kewarganegaraan. Pelaporan penelitian mengacu pada prinsip Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020. PRISMA 2020 menyediakan pedoman transparansi dalam menjelaskan proses identifikasi, seleksi, kelayakan, dan sintesis literatur.

Sumber Data

Literatur ditelusuri melalui basis data dan mesin pencarian akademik yang relevan, terutama:

* Google Scholar;
* Scopus;
* Web of Science;
* DOAJ;
* Garuda;
* portal jurnal perguruan tinggi;
* situs resmi lembaga pemerintah yang relevan.

Kata kunci yang digunakan dikombinasikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain:

“academic library” AND “civic literacy”

“academic library” AND “civic engagement”
“information literacy” AND “civic literacy”
“information literacy” AND university students
“Pancasila education” AND “civic literacy”
“Pancasila” AND “digital literacy” AND university students
“perpustakaan perguruan tinggi” AND “literasi kewarganegaraan”

Kriteria Inklusi

Artikel yang dipertimbangkan dalam kajian memenuhi kriteria:

1. diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. membahas salah satu atau lebih tema perpustakaan, literasi informasi, civic literacy, civic engagement, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, atau literasi digital;
3. berkaitan dengan pendidikan, mahasiswa, perguruan tinggi, atau lingkungan informasi;
4. artikel tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
5. mengutamakan publikasi tahun 2021–2026, dengan beberapa karya teoritis sebelumnya digunakan sebagai landasan konseptual.

Kriteria Eksklusi

Literatur dikeluarkan apabila:

1. tidak mempunyai hubungan substantif dengan fokus penelitian;
2. berupa artikel populer tanpa basis akademik;
3. duplikasi publikasi;
4. hanya membahas perpustakaan dari aspek teknis tanpa keterkaitan dengan literasi;
5. hanya membahas civic literacy pada pendidikan dasar tanpa relevansi konseptual terhadap pendidikan tinggi.

Analisis Data

Literatur yang memenuhi kriteria dianalisis menggunakan thematic synthesis. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

1. identifikasi konsep utama setiap penelitian;
2. pengelompokan penelitian berdasarkan tema;
3. sintesis hubungan antartema untuk menghasilkan model konseptual.

Tema utama yang digunakan adalah:

* perpustakaan sebagai ruang pembelajaran;
* literasi informasi;
* civic literacy;
* pendidikan Pancasila;
* literasi digital;
* civic engagement;
* peran pustakawan;
* kolaborasi perpustakaan dan dosen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan menyintesis hasil penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, civic literacy, pendidikan Pancasila, literasi digital, dan partisipasi kewarganegaraan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung penguatan literasi kewarganegaraan di lingkungan pendidikan tinggi. Snyder (2019) menjelaskan bahwa kajian literatur merupakan metodologi penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman konseptual melalui penelaahan dan sintesis penelitian terdahulu. Sejalan dengan hal tersebut, Xiao dan Watson (2019) menekankan pentingnya tahapan yang sistematis dalam pelaksanaan kajian literatur agar proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan transparan.

Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa sumber informasi akademik dan ilmiah, yaitu Google Scholar, Scopus, Web of Science, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garuda, portal jurnal perguruan tinggi, serta situs resmi lembaga pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain “academic library” AND “civic literacy”, “academic library” AND “civic engagement”,

“information literacy” AND “civic literacy”, “information literacy” AND university students, “Pancasila education” AND “civic literacy”, “Pancasila” AND “digital literacy” AND university students, serta “perpustakaan perguruan tinggi” AND “literasi kewarganegaraan”. Penggunaan kombinasi kata kunci dan sumber informasi yang relevan merupakan bagian penting dalam proses penelusuran literatur sistematis untuk memperoleh publikasi yang sesuai dengan fokus kajian (Xiao & Watson, 2019).

Pemilihan literatur didasarkan pada kesesuaian sumber dengan tujuan dan fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah dan sumber akademik yang kredibel, membahas perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, literasi kewarganegaraan, keterlibatan warga negara (civic engagement), pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, atau literasi digital. Literatur yang dipilih juga memiliki keterkaitan dengan konteks pendidikan, mahasiswa, perguruan tinggi, maupun lingkungan informasi. Sumber berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dipertimbangkan, dengan prioritas publikasi tahun 2021–2026, sedangkan literatur yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki relevansi konseptual dan teoretis. Adapun kriteria eksklusi mencakup publikasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian, sumber populer yang tidak memiliki dasar akademik memadai, publikasi duplikat, penelitian yang hanya membahas aspek teknis perpustakaan tanpa keterkaitan dengan literasi, serta penelitian mengenai literasi kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar yang tidak memiliki relevansi konseptual dengan pendidikan tinggi. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi diperlukan untuk menjaga relevansi sumber serta memperjelas dasar pemilihan literatur dalam suatu kajian sistematis (Page et al., 2021).

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik (thematic synthesis). Literatur yang relevan dikelompokkan berdasarkan sejumlah tema utama, yaitu perpustakaan perguruan tinggi sebagai ruang pembelajaran, literasi informasi, literasi kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, literasi digital, partisipasi kewarganegaraan, peran pustakawan, serta kolaborasi antara pustakawan dan dosen. Selanjutnya, temuan dari berbagai sumber dibandingkan dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, hubungan antarkonsep, serta kontribusi masing-masing tema terhadap penguatan literasi kewarganegaraan mahasiswa. Thomas dan Harden (2008) menjelaskan bahwa sintesis tematik dapat digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema penting dari berbagai hasil penelitian, kemudian mengembangkan interpretasi yang lebih luas berdasarkan temuan yang dianalisis.

Untuk menjaga transparansi proses kajian, tahapan penelitian dijelaskan melalui proses penelusuran sumber, penentuan kriteria inklusi dan eksklusi, pemilihan literatur yang relevan, serta sintesis hasil penelitian. Page et al. (2021) menjelaskan bahwa pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pelaporan proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan studi dalam kajian sistematis. Namun, jumlah keseluruhan dokumen yang ditemukan, dokumen duplikat, dokumen yang dikeluarkan pada tahap penyaringan, dan jumlah akhir literatur yang dianalisis tidak dicantumkan karena data rekapitulasi pada setiap tahapan penelusuran tidak tersedia dalam dokumentasi penelitian. Oleh karena itu, hasil kajian disajikan berdasarkan literatur yang relevan dan dapat diidentifikasi dalam naskah, tanpa mengasumsikan jumlah seleksi yang tidak terdokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Peta Kajian Terdahulu

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam empat kecenderungan utama.

Kelompok Kajian
Literasi informasi
Civic literacy
Pendidikan Pancasila
Perpustakaan dan civic literacy

Fokus Utama

Kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi

Pengetahuan dan kemampuan kewarganegaraan
Nilai, karakter, dan kewarganegaraan
Peran pustakawan dan layanan informasi

Temuan Utama
Mahasiswa membutuhkan kemampuan mengevaluasi sumber digital
Civic literacy berkaitan dengan pemahaman isu publik dan partisipasi
Pancasila dapat menjadi dasar penguatan civic literacy
Perpustakaan berpotensi menjadi civik learning space

Penelitian mengenai literasi informasi di perpustakaan perguruan tinggi menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan sumber informasi merupakan aspek penting dalam pemanfaatan sumber digital. Sementara itu, penelitian mengenai civic literacy menunjukkan hubungan antara kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kesadaran politik, dan partisipasi kewarganegaraan. Penelitian tentang Pancasila menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isu sosial dan politik sekaligus membangun karakter demokratis. Kajian mengenai perpustakaan menunjukkan bahwa perpustakaan dapat berperan lebih jauh daripada penyedia sumber informasi. Perpustakaan dapat menjadi tempat kegiatan diskusi, program civic literacy, penyedia informasi pemerintahan, dan fasilitator keterlibatan mahasiswa.

Perpustakaan sebagai Ruang Civic Learning

Konsep perpustakaan sebagai ruang civic learning merupakan pengembangan dari fungsi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan.
Ruang civic learning dapat dimaknai sebagai lingkungan yang memungkinkan mahasiswa:

1. memperoleh informasi yang kredibel;
2. memahami isu publik;
3. membandingkan berbagai perspektif;
4. melakukan dialog;
5. mengembangkan argumentasi;
6. memahami hak dan kewajiban;
7. berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi ruang pertemuan antara informasi, pengetahuan, dialog, dan kewarganegaraan. Paradigma perpustakaan perguruan tinggi telah mengalami transformasi fundamental. Dari sekadar unit administratif penyimpan buku, perpustakaan kini bertransisi menjadi pusat pembelajaran aktif (active learning center) yang dinamis, inklusif, dan berbasis teknologi. Transformasi ini merespons kebutuhan mahasiswa akan akses informasi yang cepat, relevan, dan terpercaya dalam ekosistem akademik modern. Pustakawan tidak lagi berperan sebatas penjaga koleksi, tetapi tampil sebagai pemandu navigasi informasi yang kritis dan etis. Mereka membekali mahasiswa dengan kompetensi evaluasi sumber, pemahaman hak cipta, serta strategi penelusuran informasi yang efisien di berbagai platform digital. Dengan demikian, perpustakaan menjadi mitra strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Konsep ini sejalan dengan kajian Kranich yang menempatkan perpustakaan sebagai salah satu institusi yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan civic literacy dan demokrasi.

Hasil Penelitian

Peta Kajian Terdahulu

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai penguatan civic literacy melalui perpustakaan perguruan tinggi dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu literasi informasi, civic literacy, pendidikan Pancasila, serta peran perpustakaan dalam pembelajaran kewarganegaraan. Keempat tema tersebut memiliki keterkaitan konseptual, tetapi menekankan aspek yang berbeda. Literasi informasi berorientasi pada kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi, sedangkan civic literacy menekankan pemahaman terhadap persoalan publik dan kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara. Pendidikan Pancasila memberikan landasan nilai dan

etika, sementara perpustakaan menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung pengembangan kompetensi tersebut.

Tabel 1. Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Kranich (2024)	Kajian konseptual dan analisis literatur	Perpustakaan memiliki peran strategis dalam membangun civic literacy melalui pendidikan informasi, dialog demokratis, dan penguatan partisipasi masyarakat.	The Library Quarterly
2	Supriyono et al. (2022)	Kuantitatif deskriptif	Pemahaman mahasiswa terhadap materi Pendidikan Pancasila menunjukkan hasil yang beragam. Temuan ini memperlihatkan pentingnya penguatan pemahaman konseptual dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa.	Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3	Sutisna et al. (2026)	Kualitatif deskriptif melalui systematic literature review	Pendidikan Pancasila yang terlalu normatif dan teoretis dapat membatasi pengembangan pemikiran kritis dan partisipasi. Pembelajaran dialogis, transformatif, dan berbasis komunitas diperlukan untuk memperkuat civic literacy.	Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
4	Adeoye et al. (2024)	Kajian strategi pedagogis	Strategi pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa dapat mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, termasuk kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran aktif.	Journal of Nonformal Education
5	Alrakhman et al. (2024)	Penelitian mengenai kewarganegaraan digital dalam pembelajaran	Kewarganegaraan digital berkaitan dengan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan pentingnya kompetensi digital dalam kehidupan warga negara.	Jurnal Civics

Berdasarkan Tabel 1, terdapat kesamaan pandangan bahwa pengembangan kompetensi kewarganegaraan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian pengetahuan secara teoretis. Kranich (2024) menekankan bahwa perpustakaan dapat berkontribusi terhadap pembentukan warga negara yang aktif melalui penguatan literasi informasi dan penyediaan ruang dialog. Pandangan tersebut diperkuat oleh Sutisna et al. (2026), yang menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila perlu diarahkan pada proses reflektif, dialogis, dan partisipatif agar mahasiswa tidak hanya memahami nilai kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, Supriyono et al. (2022) memperlihatkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap materi Pendidikan Pancasila masih menunjukkan variasi pada berbagai aspek. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan materi secara konseptual perlu diikuti dengan kegiatan pembelajaran yang mendorong penerapan nilai dalam menghadapi persoalan aktual. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara pendidikan Pancasila, literasi informasi, dan pengembangan civic literacy. Pendidikan Pancasila memberikan landasan nilai, literasi informasi menyediakan kemampuan

untuk menilai kebenaran informasi, sedangkan perpustakaan menyediakan sumber pengetahuan dan lingkungan pembelajaran yang mendukung proses tersebut.

Namun, hasil kajian juga menunjukkan adanya celah penelitian. Kajian literasi informasi lebih banyak menempatkan kemampuan mengakses dan mengevaluasi sumber sebagai tujuan pembelajaran akademik, sedangkan kajian civic literacy lebih menekankan pemahaman kewarganegaraan dan partisipasi publik. Kedua aspek tersebut belum selalu diintegrasikan dalam fungsi perpustakaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif integratif dengan menempatkan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran kewarganegaraan yang menghubungkan keterampilan informasi, pemahaman isu publik, internalisasi nilai Pancasila, dan keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan demokratis.

Literasi Informasi sebagai Dasar Civic Literacy

Literasi informasi memiliki posisi penting karena mahasiswa tidak dapat menjadi warga negara yang kritis tanpa kemampuan menilai kualitas informasi.
Kemampuan tersebut mencakup:

Mengidentifikasi kebutuhan informasi
↓
Mencari sumber
↓
Mengevaluasi kredibilitas
↓
Membandingkan informasi
↓
Memahami konteks
↓
Menggunakan informasi secara etis
↓
Membentuk pendapat
↓
Berpartisipasi dalam kehidupan publik

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa literasi informasi dapat menjadi salah satu jalur pembentukan civic literacy. Literasi Kewarganegaraan dalam Konteks Society 5.0 Civic literacy atau literasi kewarganegaraan mencakup kemampuan warga negara khususnya mahasiswa untuk memahami hak dan kewajiban sipil, berpartisipasi aktif dalam demokrasi, serta berkontribusi konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Society 5.0, literasi ini diperluas hingga mencakup kompetensi digital sebagai medium partisipasi politik dan sosial. Tantangan menjaga wawasan kebangsaan semakin kompleks di tengah arus globalisasi yang masif. Pengaruh budaya asing, sekularisme ekstrem, dan populisme digital berpotensi menggerus identitas nasional mahasiswa. Perpustakaan perguruan tinggi berperan menyediakan koleksi dan program yang memperkuat pemahaman konstitusi, sejarah bangsa, serta nilai-nilai demokrasi Pancasilais bagi seluruh sivitas akademika. Dalam konteks perguruan tinggi, perpustakaan memiliki posisi yang strategis karena mahasiswa dapat memperoleh sumber akademik, sumber pemerintah, dokumen hukum, data penelitian, dan berbagai sumber primer melalui perpustakaan.

Literasi informasi merupakan kompetensi dasar dalam pembentukan civic literacy karena kemampuan memahami persoalan publik sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan seseorang. Mahasiswa yang memiliki akses terhadap informasi belum tentu memiliki kemampuan untuk membedakan fakta, opini, disinformasi, dan manipulasi informasi. Oleh sebab itu, akses informasi harus diikuti dengan kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber, memeriksa bukti, dan memahami konteks informasi sebelum membentuk suatu pandangan.

Hubungan antara literasi informasi dan civic literacy dapat dijelaskan melalui proses bertahap. Pertama, mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan informasi berdasarkan persoalan publik yang sedang dipelajari. Kedua, mahasiswa melakukan penelusuran melalui sumber akademik, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan media yang memiliki kredibilitas. Ketiga, informasi yang diperoleh

dievaluasi melalui pemeriksaan identitas penulis, tanggal penerbitan, bukti pendukung, tujuan penyampaian, dan kesesuaian dengan sumber lainnya.

Keempat, mahasiswa membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kemungkinan adanya bias. Kelima, proses tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai isu publik, termasuk penyebab permasalahan, pihak-pihak yang terlibat, dampak kebijakan, dan alternatif penyelesaian. Keenam, pemahaman tersebut menjadi dasar pembentukan pendapat dan argumentasi yang rasional. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk terlibat dalam diskusi, menyampaikan aspirasi, mengikuti kegiatan sosial, atau memberikan masukan terhadap persoalan di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara literasi informasi dan civic literacy tidak bersifat otomatis. Kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi merupakan prasyarat penting, tetapi perlu didukung oleh kemampuan berpikir kritis, pengetahuan kewarganegaraan, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Mahasiswa yang mampu memverifikasi informasi, misalnya, akan lebih siap menilai suatu kebijakan publik berdasarkan bukti daripada sekadar mengikuti opini yang berkembang di media sosial. Proses inilah yang menghubungkan kompetensi informasi dengan terbentuknya kesadaran dan keterlibatan kewarganegaraan.

Pancasila sebagai Kerangka Etis Literasi Informasi

Literasi informasi tidak hanya menyangkut kemampuan teknis. Cara informasi digunakan juga membutuhkan landasan etis. Nilai Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka etis.

Sila Pertama

Penggunaan informasi harus dilandasi kejujuran dan tanggung jawab moral.

Sila Kedua

Informasi tidak boleh digunakan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau merugikan martabat manusia.

Sila Ketiga

Mahasiswa perlu memiliki kemampuan menghadapi informasi yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan.

Sila Keempat

Mahasiswa perlu mengembangkan budaya dialog, menghargai perbedaan pendapat, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional.

Sila Kelima

Akses terhadap informasi perlu dikembangkan secara adil sehingga mahasiswa memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memperoleh pengetahuan.

Dengan demikian, Pancasila memberikan dimensi etis dan kebangsaan terhadap literasi informasi.

Integrasi Perpustakaan, Literasi Informasi, dan Civic Literacy

Berdasarkan sintesis literatur, integrasi dapat dirumuskan dalam model berikut:

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
↓
Akses informasi kredibel
↓
LITERASI INFORMASI
↓
Evaluasi dan verifikasi informasi
↓
Pemahaman isu publik
↓
CIVIC LITERACY
↓
Internalisasi nilai Pancasila
↓
Etika digital + berpikir kritis + kesadaran kewarganegaraan
↓

Civic engagement
↓
Mahasiswa sebagai warga negara kritis, demokratis dan bertanggung jawab

Model ini merupakan kontribusi konseptual utama penelitian.

PEMBAHASAN

Transformasi Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perubahan lingkungan informasi menuntut transformasi fungsi perpustakaan. Paradigma lama menempatkan perpustakaan sebagai:

koleksi → layanan → pemustaka

Sedangkan paradigma yang lebih sesuai dengan era digital dapat dikembangkan menjadi:

informasi → literasi → pemikiran kritis → dialog → partisipasi

Perubahan tersebut tidak berarti fungsi konvensional perpustakaan ditinggalkan. Sebaliknya, fungsi penyediaan sumber informasi menjadi fondasi bagi fungsi pendidikan dan kewarganegaraan. Perpustakaan perlu menjadi ruang yang membantu mahasiswa memahami bagaimana informasi diperoleh, diverifikasi, dan digunakan.

Perpustakaan sebagai Mitra Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sering kali berlangsung melalui pembelajaran kelas. Padahal, internalisasi nilai Pancasila membutuhkan lingkungan belajar yang lebih luas.
Perpustakaan dapat menjadi mitra pembelajaran melalui:

* penyediaan koleksi Pancasila;
* penyediaan sumber tentang demokrasi dan konstitusi;
* pameran buku bertema kebangsaan;
* diskusi isu aktual;
* bedah buku;
* literasi informasi;
* literasi digital;
* podcast kewarganegaraan;
* penyediaan sumber hukum dan kebijakan publik.

Kolaborasi pustakawan dan dosen menjadi penting. Dosen memberikan perspektif konseptual dan pedagogis, sedangkan pustakawan memberikan kompetensi dalam menemukan, mengevaluasi, mengelola, dan mengakses informasi. Kolaborasi tersebut dapat menghasilkan program yang lebih kontekstual.

Peran Pustakawan sebagai Civic Literacy Facilitator

Peran pustakawan tidak lagi hanya sebagai pengelola koleksi dan pemberi layanan informasi. Dalam model yang diusulkan penelitian ini, pustakawan dapat menjalankan peran sebagai:

1. information facilitator, membantu mahasiswa memperoleh sumber;
2. information literacy educator, membimbing evaluasi informasi;
3. civic information facilitator, menyediakan informasi publik dan kebijakan;
4. discussion facilitator, mendukung kegiatan diskusi akademik;
5. digital literacy facilitator, membantu mahasiswa menghadapi informasi digital;
6. collaborative educator, bekerja sama dengan dosen.

Peran tersebut relevan dengan perkembangan perpustakaan akademik di berbagai negara yang mulai mengembangkan program civic literacy dan civic engagement.

Strategi Implementasi

Model tersebut dapat diimplementasikan melalui beberapa program.
Program 1: Civic Information Corner
Perpustakaan menyediakan ruang atau kanal digital yang mengumpulkan:

* UUD NRI 1945;

* peraturan perundang-undangan;
* kebijakan pemerintah;
* data statistik;
* buku Pancasila;
* jurnal kewarganegaraan;
* informasi demokrasi;
* isu sosial kontemporer.

Program 2: Cek Fakta Akademik
Mahasiswa diberikan latihan membandingkan:
* berita;
* media sosial;
* sumber pemerintah;
* artikel ilmiah;
* sumber primer.

Tujuannya adalah membangun kebiasaan verifikasi.
Program 3: Pancasila Reading Forum
Perpustakaan dan dosen Pancasila dapat menyelenggarakan diskusi berkala mengenai isu aktual dari perspektif Pancasila.
Program 4: Digital Civic Literacy
Konten singkat dapat dibuat melalui Instagram, YouTube, podcast, atau website perpustakaan.
Contoh tema:
* "Cara Mengecek Berita Politik"
* "Membedakan Fakta dan Opini"
* "Bagaimana Membaca Undang-Undang?"
* "Etika Berdiskusi di Media Sosial"
* "Pancasila dan Tantangan AI"

Program 5: Civic Literacy Week
Kegiatan tahunan dapat berupa:
* bedah buku;
* diskusi publik;
* lomba esai;
* pameran koleksi;
* debat mahasiswa;
* workshop literasi informasi.

Strategi Penguatan Literasi melalui Layanan Perpustakaan Penguatan literasi informasi membutuhkan strategi layanan perpustakaan yang inovatif dan terstruktur. Implementasi program edukasi pengguna (user education) dirancang untuk melatih mahasiswa mengevaluasi validitas sumber informasi, memahami etika pengutipan, serta mengenali ciri-ciri sumber akademik bereputasi. Program ini dapat diintegrasikan sebagai modul wajib dalam orientasi mahasiswa baru maupun sebagai pelatihan berkala. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi pilar krusial dalam strategi layanan modern. Perpustakaan perguruan tinggi mengoptimalkan akses ke e-resources berkualitas seperti jurnal internasional, basis data akademik, dan repositori institusional. Portal daring perpustakaan, panduan penelusuran digital (LibGuides), serta webinar literasi informasi menjadi instrumen efektif dalam memperluas jangkauan layanan melampaui batas fisik gedung perpustakaan.

Kolaborasi Strategis: Perpustakaan, Dosen, dan Institusi Keberhasilan program literasi informasi tidak dapat bergantung pada perpustakaan semata. Diperlukan kolaborasi strategis antara pustakawan, dosen pengampu mata kuliah, dan pimpinan institusi untuk mengintegrasikan kompetensi literasi ke dalam kurikulum akademik secara sistematis. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan embedded librarianship, di mana pustakawan turut dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran semester. Sinergi lintas unit merupakan kunci terciptanya ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara perpustakaan, unit teknologi informasi, lembaga pengabdian masyarakat, dan pusat karier kampus akan menghasilkan program komprehensif yang menyentuh

seluruh dimensi perkembangan mahasiswa dari kompetensi akademik hingga kesadaran sosial dan kewarganegaraan yang

Perpustakaan sebagai Agen Perubahan Sosial Perpustakaan perguruan tinggi masa kini melampaui fungsi akademik semata ia hadir sebagai agen perubahan sosial yang aktif berkontribusi dalam pemberdayaan komunitas. Pendekatan perpustakaan berbasis komunitas (community-based library) mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya informasi untuk memecahkan persoalan nyata di masyarakat sekitar kampus. Studi kasus yang menarik adalah pemanfaatan perpustakaan sebagai hub pengabdian masyarakat dalam kerangka KKN Tematik. Perpustakaan menyediakan materi ajar, panduan literasi, dan platform digital yang dapat digunakan mahasiswa peserta KKN untuk memberdayakan masyarakat desa dengan keterampilan literasi digital, kesehatan informasi, dan pengetahuan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila secara langsung di lapangan. "Perpustakaan yang sejati bukan hanya menyimpan pengetahuan, tetapi menyebarkannya ke seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi."berbasis nilai Pancasila.

Internalisasi Nilai Pancasila melalui Media Baca Koleksi perpustakaan memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk kesadaran kebangsaan mahasiswa. Pemanfaatan koleksi khusus yang mencakup literatur kebangsaan, karya-karya pendiri bangsa, kajian Pancasila, dan sejarah perjuangan kemerdekaan menjadi instrumen efektif dalam menumbuhkan nasionalisme yang autentik dan berbasis pengetahuan bukan sekadar sentimentalisme emosional. Di luar koleksi tertulis, forum komunitas seperti diskusi buku (book discussion), bedah buku bertemakan kebangsaan, dan kelompok membaca (reading club) menjadi ruang penting internalisasi nilai. Interaksi dialogis dalam forum ini merangsang mahasiswa berpikir kritis terhadap isu kebangsaan, memperluas perspektif, dan membangun solidaritas intelektual yang berlandaskan semangat kebersamaan dan keadilan sosial Pancasila.

Tantangan Operasional dan Kelembagaan Meski memiliki potensi besar, perpustakaan perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan operasional yang signifikan. Struktur birokrasi kampus yang masih bersifat hirarkis kerap memperlambat proses pengambilan keputusan terkait pengembangan program dan anggaran perpustakaan. Posisi perpustakaan yang sering dianggap sebagai unit pendukung bukan unit strategis menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak proporsional dibandingkan kebutuhan aktualnya. Tantangan kedua adalah kesenjangan kompetensi sosial pustakawan dalam merancang program yang berdampak nyata. Tidak sedikit pustakawan yang terampil dalam pengelolaan teknis koleksi namun kurang memiliki kompetensi dalam fasilitasi komunitas, desain pembelajaran, dan komunikasi publik. Pengembangan kapasitas pustakawan menjadi agenda mendesak agar perpustakaan dapat berperan optimal sebagai agen literasi dan perubahan sosial.

Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Jaminan mutu layanan perpustakaan memerlukan sistem evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pemustaka. Evaluasi rutin mencakup pengukuran tingkat kenyamanan ruang baca, aksesibilitas koleksi, responsivitas layanan, serta relevansi program literasi yang diselenggarakan. Data evaluasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perencanaan pengembangan perpustakaan ke depan. Kualitas layanan perpustakaan dapat diukur menggunakan instrumen seperti LibQUAL+ yang mencakup tiga dimensi utama: kehandalan (reliability) dalam pemenuhan janji layanan, ketanggapan (responsiveness) terhadap kebutuhan pemustaka, serta empati (empathy) pustakawan dalam memahami dan melayani pengguna secara personal dan penuh perhatian.

Pemanfaatan Platform Digital untuk Literasi Pancasila Era digital membuka peluang tak terbatas bagi perpustakaan untuk menjangkau mahasiswa melalui kanalkanal yang telah menjadi habitat keseharian mereka. Penggunaan media social Instagram, YouTube, TikTok, dan podcast sebagai sarana edukasi ideologi bangsa memungkinkan penyampaian pesan kebangsaan dalam format yang menarik, ringkas, dan mudah dicerna oleh generasi Z. Konten kreatif berbasis nilai Pancasila dapat dikemas sebagai infografis, video pendek, atau seri diskusi daring. Strategi kreatif lain yang terbukti efektif adalah penyelenggaraan kompetisi literasi digital seperti lomba esai kebangsaan, pembuatan konten edukatif berlandaskan Pancasila, dan debat daring tentang isu sosial kontemporer. Program-program ini tidak hanya memotivasi kreativitas mahasiswa, tetapi juga menanamkan pembiasaan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam berkarya di ruang digital.

Membangun Karakter Mahasiswa yang Berintegritas Mahasiswa yang melek informasi dan berjiwa Pancasila adalah aset terbesar bangsa. Mereka bukan sekadar penerima ilmu, melainkan agen

perubahan aktif yang menjunjung tinggi solidaritas sosial, kejujuran intelektual, dan etika dalam berkarya. Perpustakaan berperan membentuk ekosistem yang memfasilitasi pertumbuhan karakter ini melalui pengalaman belajar yang bermakna, inklusif, dan berbasis nilai luhur kebangsaan. Dampak literasi digital yang berlandaskan Pancasila terhadap capaian akademik mahasiswa terbukti signifikan. Mahasiswa dengan kompetensi literasi informasi yang tinggi cenderung menghasilkan karya ilmiah berkualitas, memiliki kemampuan argumentasi yang lebih baik, serta lebih mampu berpikir kritis dan reflektif dalam menghadapi persoalan akademik maupun sosial. Integritas intelektual yang tumbuh dari budaya literasi menjadi modal penting dalam perjalanan karier dan kehidupan bermasyarakat mereka.

PEMBAHASAN

Transformasi Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perubahan lingkungan informasi pada era digital menuntut perpustakaan perguruan tinggi untuk mengembangkan fungsi yang tidak terbatas pada penyediaan koleksi dan pelayanan pemustaka. Perpustakaan perlu mengambil peran lebih luas sebagai ruang pembelajaran yang membantu mahasiswa memperoleh, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, paradigma pengelolaan perpustakaan yang semula berorientasi pada hubungan koleksi, layanan, dan pemustaka perlu diperluas menjadi proses yang menghubungkan akses informasi, literasi informasi, pemikiran kritis, dialog, dan partisipasi kewarganegaraan.

Perubahan paradigma tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi konvensional perpustakaan. Penyediaan koleksi, layanan referensi, dan akses terhadap sumber akademik tetap menjadi fondasi utama. Namun, keberadaan sumber informasi perlu diikuti dengan kegiatan yang membantu mahasiswa memahami konteks, kredibilitas, tujuan, dan implikasi informasi yang diperoleh. Association of College and Research Libraries (2016) menegaskan bahwa literasi informasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menemukan informasi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai proses penciptaan informasi, otoritas sumber, nilai informasi, serta penggunaan informasi secara etis. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa perpustakaan memiliki peluang untuk mengembangkan pembelajaran yang melampaui keterampilan teknis penelusuran informasi.

Gagasan tersebut sejalan dengan Kranich (2024), yang menekankan bahwa perpustakaan perlu memperluas orientasi literasi informasi agar turut mendukung kompetensi kewarganegaraan. Akan tetapi, perluasan fungsi tersebut tidak cukup dilakukan dengan menambah koleksi bertema kebangsaan atau menyediakan akses terhadap informasi publik. Mahasiswa juga perlu dibimbing untuk menilai kualitas informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, dan memahami hubungan informasi dengan persoalan sosial. Dengan demikian, transformasi perpustakaan terletak pada perubahan orientasi layanan, dari sekadar menyediakan informasi menjadi memfasilitasi proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran kewarganegaraan.

Perpustakaan sebagai Mitra Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak seharusnya hanya berlangsung melalui penyampaian materi di ruang kelas. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila membutuhkan proses pembelajaran yang kontekstual, dialogis, dan berkaitan dengan persoalan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, perpustakaan dapat menjadi mitra pembelajaran melalui penyediaan koleksi tentang Pancasila, demokrasi, konstitusi, sejarah kebangsaan, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan publik. Sumber tersebut dapat diperkuat melalui pameran buku, diskusi isu aktual, bedah buku, forum membaca, podcast kewarganegaraan, dan pelatihan literasi informasi.

Namun, penyediaan sumber dan penyelenggaraan kegiatan belum secara otomatis menghasilkan internalisasi nilai Pancasila. Kegiatan perpustakaan perlu dirancang agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menghubungkan informasi tersebut dengan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, diskusi mengenai kebijakan publik dapat diarahkan untuk melatih mahasiswa mengidentifikasi persoalan, memeriksa dasar kebijakan, membandingkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat, dan menyampaikan pendapat dengan menghormati perbedaan. Proses tersebut menjadikan Pancasila sebagai kerangka analisis dalam memahami persoalan sosial, bukan sekadar materi yang dihafalkan.

Penelitian Muhajir et al. (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila yang dikaitkan dengan pengalaman digital generasi Z dapat mendukung penguatan literasi politik digital, budaya politik, dan kesadaran kewarganegaraan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya

menghubungkan pembelajaran Pancasila dengan lingkungan informasi yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Meskipun demikian, peran perpustakaan dalam proses tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pendukung dan mitra pembelajaran, bukan sebagai pengganti dosen atau mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kolaborasi dosen dan pustakawan diperlukan agar sumber informasi, kegiatan literasi, serta diskusi yang diselenggarakan memiliki landasan akademik dan tujuan pembelajaran yang jelas.

Peran Pustakawan sebagai Fasilitator Literasi Kewarganegaraan

Perluasan fungsi perpustakaan turut mengubah kompetensi dan peran pustakawan. Pustakawan tidak hanya bertanggung jawab mengelola koleksi dan memberikan layanan penelusuran, tetapi juga dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan literasi informasi dan kewarganegaraan. Dalam model yang diusulkan, peran tersebut meliputi fasilitator informasi (*information facilitator*) yang membantu mahasiswa menemukan sumber relevan; pendidik literasi informasi (*information literacy educator*) yang membimbing evaluasi sumber; fasilitator informasi kewarganegaraan (*civic information facilitator*) yang membantu akses terhadap informasi publik; fasilitator diskusi (*discussion facilitator*) yang mendukung dialog akademik; fasilitator literasi digital (*digital literacy facilitator*) yang membimbing penggunaan informasi digital secara bertanggung jawab; serta pendidik kolaboratif (*collaborative educator*) yang bekerja sama dengan dosen dan unit akademik.

Peran tersebut didukung oleh kajian Kranich (2024), yang menempatkan pustakawan sebagai pihak yang dapat membantu masyarakat mengembangkan kompetensi untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Yap et al. (2024), melalui tinjauan cakupan terhadap 22 dokumen, juga mengidentifikasi keterkaitan peran perpustakaan dengan demokrasi, ruang publik, keterlibatan kewarganegaraan, dan literasi kritis dalam menghadapi gangguan informasi di media sosial. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perpustakaan tidak berhenti pada penyediaan akses informasi, tetapi dapat diperluas pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan informasi dan kehidupan publik.

Meskipun demikian, peran pustakawan sebagai fasilitator kewarganegaraan perlu dibatasi secara profesional. Pustakawan tidak bertugas mengarahkan mahasiswa pada pandangan politik tertentu, melainkan menyediakan akses informasi yang beragam, membantu pemeriksaan kredibilitas sumber, serta menciptakan ruang dialog yang terbuka dan berimbang. Prinsip netralitas profesional, keberagaman sumber, dan kebebasan akademik perlu dijaga agar perpustakaan tetap menjadi ruang pembelajaran yang inklusif.

Hubungan Literasi Informasi dengan Civic Literacy dan Partisipasi Kewarganegaraan

Hubungan antara literasi informasi dan *civic literacy* dalam model ini perlu dipahami sebagai proses bertahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah akses dan penelusuran informasi. Pada tahap ini, perpustakaan membantu mahasiswa memperoleh sumber yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, data statistik, maupun informasi dari lembaga publik. Ketersediaan sumber yang beragam menjadi prasyarat agar mahasiswa memiliki bahan yang memadai untuk memahami persoalan sosial dan kewarganegaraan.

Tahap kedua adalah evaluasi dan verifikasi informasi. Mahasiswa tidak cukup hanya menemukan informasi, tetapi perlu menilai kredibilitas penulis atau lembaga penerbit, ketepatan data, konteks penerbitan, tujuan penyampaian informasi, serta kesesuaian informasi dengan sumber pembanding. Tahap ini penting karena informasi digital dapat memuat kekeliruan, manipulasi, maupun disinformasi. De Paor dan Heravi (2020) menempatkan pustakawan dan bidang kepustakawanan sebagai bagian dari upaya menghadapi penyebaran berita palsu melalui penguatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi informasi.

Tahap ketiga adalah pembentukan pemahaman terhadap persoalan publik. Informasi yang telah dievaluasi kemudian dibandingkan dan dihubungkan dengan konteks sosial, hukum, politik, ekonomi, serta nilai-nilai Pancasila. Melalui proses ini, mahasiswa dapat memahami bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga faktor penyebab, pihak yang terdampak, kepentingan yang terlibat, dan alternatif penyelesaian yang tersedia. Dengan demikian, literasi informasi berkontribusi terhadap *civic literacy* karena membantu mahasiswa membangun pengetahuan yang diperlukan untuk memahami hak, kewajiban, lembaga publik, kebijakan, dan persoalan masyarakat.

Tahap keempat adalah dialog dan pertukaran gagasan. Pemahaman yang terbentuk melalui evaluasi informasi perlu diuji melalui diskusi, debat akademik, bedah buku, maupun forum publik. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa belajar menyampaikan argumentasi berdasarkan bukti, mendengarkan pandangan yang berbeda, serta mempertimbangkan kepentingan bersama. Tahap ini menjadi penghubung antara pemahaman individual dan kesadaran sosial karena pengetahuan tidak hanya digunakan untuk membentuk pendapat pribadi, tetapi juga untuk memahami perspektif orang lain.

Tahap kelima adalah partisipasi kewarganegaraan. Setelah memperoleh informasi, mengevaluasinya, memahami persoalan, dan mendiskusikannya, mahasiswa diharapkan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kewarganegaraan. Bentuk partisipasi dapat berupa keterlibatan dalam pengabdian masyarakat, penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab, kegiatan advokasi berbasis data, diskusi kebijakan, maupun kontribusi dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, alur model yang diusulkan dapat dirumuskan sebagai **akses informasi → evaluasi dan verifikasi → pemahaman isu publik (*civic literacy*) → dialog kritis → partisipasi kewarganegaraan (*civic engagement*)**.

Hubungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai proses otomatis. Kemampuan mengakses informasi digital, misalnya, belum tentu membuat mahasiswa mampu berpikir kritis atau terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan. Mulyoto et al. (2026), melalui penelitian kuantitatif korelasional terhadap 126 mahasiswa, menemukan bahwa berpikir kritis berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan pembelajaran kewarganegaraan berbasis proyek dengan keterlibatan kewarganegaraan. Literasi digital menjadi prediktor langsung yang kuat terhadap keterlibatan kewarganegaraan, tetapi tidak memediasi hubungan pembelajaran berbasis proyek dengan keterlibatan tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi digital dan berpikir kritis memiliki mekanisme kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, program perpustakaan perlu menggabungkan pelatihan literasi digital dengan kegiatan analisis, refleksi, dan dialog agar kemampuan mengakses informasi dapat berkembang menjadi pemahaman dan partisipasi yang bermakna.

Temuan Hylton (2018) juga menunjukkan adanya hubungan antara literasi kewarganegaraan, empati sosial, dan tingkat keterlibatan kewarganegaraan mahasiswa. Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa pengetahuan tentang persoalan publik perlu disertai kemampuan memahami kondisi dan kepentingan kelompok lain. Dalam konteks model ini, perpustakaan dapat memfasilitasi proses tersebut melalui penyediaan sumber yang beragam dan forum diskusi yang mendorong mahasiswa melihat persoalan dari berbagai perspektif. Dengan demikian, kontribusi literasi informasi terhadap partisipasi kewarganegaraan berlangsung melalui penguatan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan kesediaan berdialog.

Strategi Implementasi Model Integrasi

Implementasi model integrasi dapat dilakukan melalui program yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Program pertama adalah *Civic Information Corner*, yaitu ruang fisik atau kanal digital yang menyediakan sumber informasi mengenai UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, data statistik, buku Pancasila, jurnal kewarganegaraan, demokrasi, dan isu sosial kontemporer. Program ini menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk memperoleh sumber primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar tidak hanya menjadi tempat penyimpanan tautan atau dokumen, setiap kelompok sumber perlu dilengkapi panduan penelusuran dan penjelasan mengenai cara memeriksa keaslian serta relevansinya.

Program kedua adalah *Cek Fakta Akademik*. Kegiatan ini dirancang melalui latihan membandingkan informasi dari berita, media sosial, situs pemerintah, artikel ilmiah, dan dokumen sumber primer. Mahasiswa dapat diminta menelusuri asal informasi, memeriksa tanggal penerbitan, mengidentifikasi penulis atau lembaga penerbit, membandingkan data, dan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti. Program ini relevan dengan tantangan disinformasi di ruang digital sebagaimana dibahas De Paor dan Heravi (2020) serta Yap et al. (2024). Dengan demikian, kegiatan cek fakta tidak hanya bertujuan menemukan informasi yang salah, tetapi juga membangun kebiasaan verifikasi sebelum mahasiswa menyebarkan atau menggunakan informasi.

Program ketiga adalah *Pancasila Reading Forum*, yaitu kegiatan membaca dan mendiskusikan buku atau artikel yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan persoalan kebangsaan. Diskusi dapat diarahkan pada isu aktual, seperti kesetaraan, keberagaman, keadilan sosial, demokrasi, dan etika

penggunaan teknologi. Program keempat adalah *Digital Civic Literacy* melalui Instagram, YouTube, podcast, atau situs perpustakaan. Materi dapat disajikan dalam bentuk infografis, video singkat, dan diskusi daring mengenai cara memeriksa berita politik, membedakan fakta dan opini, membaca peraturan, etika berdiskusi di media sosial, serta hubungan Pancasila dengan perkembangan kecerdasan artifisial. Program kelima adalah *Civic Literacy Week* yang mengintegrasikan bedah buku, diskusi publik, lomba esai, pameran koleksi, debat mahasiswa, dan lokakarya literasi informasi.

Kelima program tersebut perlu dirancang sebagai satu rangkaian pembelajaran. *Civic Information Corner* menyediakan sumber; *Cek Fakta Akademik* melatih evaluasi; *Pancasila Reading Forum* mengembangkan pemahaman dan dialog; *Digital Civic Literacy* memperluas jangkauan pembelajaran; sedangkan *Civic Literacy Week* menjadi ruang untuk menunjukkan hasil pemahaman dan partisipasi mahasiswa. Keterhubungan ini penting agar program perpustakaan tidak hanya bersifat seremonial atau insidental, tetapi berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.

Penguatan Layanan dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Penguatan literasi informasi membutuhkan layanan perpustakaan yang inovatif dan terstruktur. Program pendidikan pemustaka (*user education*) dapat dikembangkan dari orientasi pengenalan fasilitas menjadi pelatihan keterampilan penelusuran, evaluasi sumber, etika pengutipan, dan penggunaan basis data akademik. Pelatihan tersebut dapat diberikan kepada mahasiswa baru maupun diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang membutuhkan kemampuan penelusuran dan pengolahan informasi. Kerangka ACRL (2016) dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun materi pembelajaran karena menempatkan pencarian, evaluasi, pemanfaatan, dan penciptaan informasi sebagai proses yang saling berkaitan.

Pemanfaatan teknologi digital juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas akses dan pembelajaran, bukan hanya pada perluasan kanal komunikasi. Perpustakaan dapat mengoptimalkan jurnal elektronik, basis data akademik, repositori institusional, katalog daring, panduan penelusuran digital, dan webinar literasi informasi. Media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dapat digunakan untuk menyampaikan materi singkat mengenai verifikasi informasi, literasi hukum, etika digital, serta isu kewarganegaraan. Namun, efektivitas penggunaan media tersebut tidak cukup diukur dari jumlah unggahan atau jumlah pengikut. Evaluasi perlu memperhatikan keterlibatan mahasiswa, pemahaman terhadap materi, kemampuan menerapkan keterampilan verifikasi, dan tindak lanjut kegiatan pembelajaran.

Muhajir et al. (2025) menunjukkan bahwa pengintegrasian pengalaman digital generasi Z ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat mendukung penguatan literasi politik digital dan kesadaran kewarganegaraan. Sementara itu, Mulyoto et al. (2026) memperlihatkan bahwa literasi digital memiliki hubungan langsung dengan keterlibatan kewarganegaraan, tetapi penguatan berpikir kritis tetap diperlukan dalam proses pembelajaran. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital perlu ditempatkan sebagai sarana pembelajaran yang disertai pendampingan dan refleksi. Tanpa proses tersebut, penggunaan media digital berisiko hanya meningkatkan konsumsi informasi, bukan kualitas pemahaman mahasiswa.

Kolaborasi Strategis antara Perpustakaan, Dosen, dan Institusi

Keberhasilan model integrasi tidak dapat dibebankan kepada perpustakaan secara mandiri. Diperlukan kolaborasi antara pustakawan, dosen pengampu mata kuliah, pimpinan perguruan tinggi, unit teknologi informasi, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat. Dosen berperan menentukan capaian pembelajaran dan memberikan kerangka konseptual, sedangkan pustakawan mendukung pemilihan sumber, strategi penelusuran, evaluasi informasi, dan pengelolaan pengetahuan. Pimpinan perguruan tinggi berperan menyediakan kebijakan, sumber daya, dan dukungan kelembagaan agar kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan adalah *embedded librarianship*, yaitu keterlibatan pustakawan dalam kegiatan pembelajaran atau mata kuliah tertentu. Dalam pelaksanaannya, pustakawan dapat bekerja sama dengan dosen sejak tahap perencanaan pembelajaran, penyusunan bahan ajar, pelaksanaan pelatihan penelusuran, hingga evaluasi tugas mahasiswa. Andres dan Usova (2024) menjelaskan bahwa kolaborasi pustakawan pengajar dengan dosen bidang keilmuan memiliki berbagai dimensi, termasuk tujuan, karakteristik, batasan, dan hasil kolaborasi. Kajian tersebut juga mengingatkan bahwa istilah kolaborasi perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran dan mekanisme kerja yang jelas. Oleh sebab itu, kerja sama perpustakaan dan dosen tidak cukup diwujudkan

melalui kegiatan bersama yang bersifat sesaat, tetapi perlu memiliki tujuan, tanggung jawab, dan evaluasi yang disepakati.

Kolaborasi lintas unit juga dapat memperluas dampak program. Unit teknologi informasi dapat membantu pengembangan kanal digital, lembaga pengabdian masyarakat dapat menghubungkan kegiatan literasi dengan kebutuhan komunitas, sedangkan unit kemahasiswaan dapat mendukung forum diskusi dan kegiatan partisipatif. Melalui koordinasi tersebut, perpustakaan dapat menjadi simpul penghubung antara sumber pengetahuan, kegiatan akademik, dan kebutuhan masyarakat.

Perpustakaan sebagai Agen Perubahan Sosial

Perpustakaan perguruan tinggi berpotensi memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial melalui pemanfaatan sumber informasi dan kompetensi mahasiswa untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Peran ini dapat dikembangkan melalui keterlibatan perpustakaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Perpustakaan dapat menyediakan materi pembelajaran, panduan literasi digital, sumber informasi kesehatan yang tepercaya, dokumen kebijakan publik, serta bahan edukasi kewarganegaraan yang dibutuhkan mahasiswa selama menjalankan kegiatan pengabdian.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dapat menerapkan keterampilan literasi informasi untuk membantu masyarakat mengakses informasi layanan publik, mengenali informasi palsu, memahami hak dan kewajiban warga, serta memanfaatkan sumber digital secara aman dan bertanggung jawab. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menguji pemahaman yang diperoleh melalui pembelajaran akademik dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, hubungan antara literasi informasi dan partisipasi kewarganegaraan tidak berhenti pada diskusi di lingkungan kampus, tetapi dapat diwujudkan dalam kontribusi sosial.

Meskipun demikian, keterlibatan perpustakaan dalam pengabdian masyarakat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas. Materi yang disediakan harus relevan, mudah dipahami, dan bersumber dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perpustakaan juga perlu bekerja sama dengan dosen pembimbing dan mitra masyarakat agar kegiatan tidak bersifat satu arah. Pendekatan partisipatif diperlukan supaya masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut mengidentifikasi persoalan dan menentukan kebutuhan pembelajaran.

Internalisasi Nilai Pancasila melalui Koleksi dan Budaya Membaca

Koleksi perpustakaan dapat mendukung pengembangan kesadaran kebangsaan apabila dikelola dan dimanfaatkan melalui kegiatan pembelajaran yang reflektif. Koleksi tentang Pancasila, pemikiran pendiri bangsa, sejarah perjuangan kemerdekaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dapat menjadi bahan untuk memahami perkembangan pemikiran kebangsaan serta penerapannya dalam kehidupan kontemporer. Akan tetapi, keberadaan koleksi tersebut tidak dengan sendirinya menjamin terbentuknya sikap atau karakter mahasiswa. Proses internalisasi membutuhkan kegiatan membaca, diskusi, refleksi, dan penerapan nilai dalam kehidupan akademik maupun sosial.

Forum diskusi buku, kelompok membaca, dan bedah buku dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif. Mahasiswa dapat membahas bagaimana nilai kemanusiaan diterapkan dalam kebijakan publik, bagaimana persatuan dikelola dalam masyarakat yang beragam, atau bagaimana prinsip musyawarah dan keadilan sosial diwujudkan dalam penyelesaian persoalan bersama. Melalui kegiatan tersebut, koleksi perpustakaan berfungsi sebagai sumber dialog dan pembentukan argumentasi, bukan hanya sebagai bahan bacaan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Kranich (2024) bahwa perpustakaan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran dan keterlibatan publik. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan membaca bertema Pancasila sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah buku yang dipinjam atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga berdasarkan kualitas diskusi, kemampuan mahasiswa menghubungkan bacaan dengan persoalan publik, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dibahas.

Tantangan Operasional dan Kelembagaan

Meskipun memiliki potensi yang luas, penerapan model integrasi menghadapi tantangan operasional dan kelembagaan. Pertama, posisi perpustakaan yang masih dipandang sebagai unit pendukung dapat membatasi keterlibatannya dalam perencanaan pembelajaran dan pengembangan kebijakan akademik. Keterbatasan anggaran, fasilitas digital, dan akses terhadap sumber informasi juga dapat menghambat pelaksanaan program. Kedua, kompetensi pustakawan perlu terus dikembangkan,

terutama dalam bidang literasi digital, komunikasi publik, fasilitasi diskusi, desain pembelajaran, dan pemahaman terhadap isu kewarganegaraan.

Ketiga, kolaborasi antara perpustakaan dan unit akademik tidak selalu berjalan secara sistematis. Perbedaan agenda, keterbatasan waktu, dan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dapat menyebabkan program hanya berlangsung secara insidental. Keempat, keberagaman kemampuan literasi digital mahasiswa menuntut pendekatan pembelajaran yang tidak seragam. Sebagian mahasiswa mungkin telah terbiasa menggunakan sumber digital, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengevaluasi kredibilitas dan konteks informasi.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi perpustakaan tidak cukup dilakukan melalui pengadaan teknologi atau penambahan program. Diperlukan dukungan kebijakan institusi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan anggaran, dan mekanisme koordinasi lintas unit. Selain itu, perpustakaan perlu menjaga prinsip inklusivitas, keberagaman sumber, dan kebebasan akademik agar kegiatan literasi kewarganegaraan tidak berubah menjadi penyampaian pandangan yang bersifat satu arah.**Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Layanan**

Evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa model integrasi berjalan sesuai tujuan. Penilaian tidak seharusnya hanya berfokus pada jumlah koleksi, kunjungan, peminjaman, atau kegiatan yang diselenggarakan. Evaluasi perlu mencakup proses dan hasil pembelajaran, seperti kemampuan mahasiswa menemukan sumber yang relevan, mengidentifikasi informasi yang tidak kredibel, membandingkan bukti, menyusun argumentasi, memahami isu publik, serta berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan sosial.

Kualitas layanan perpustakaan dapat dievaluasi dengan menggunakan instrumen yang sesuai, salah satunya LibQUAL+. Instrumen ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu *Affect of Service* yang berkaitan dengan kualitas interaksi dan pelayanan pustakawan, *Information Control* yang berkaitan dengan ketersediaan serta akses terhadap sumber informasi, dan *Library as Place* yang berkaitan dengan fungsi perpustakaan sebagai ruang fisik untuk belajar dan beraktivitas. Ketiga dimensi tersebut dapat membantu menilai kualitas layanan, tetapi belum cukup untuk mengukur keberhasilan pengembangan *civic literacy*. Oleh sebab itu, pengukuran kualitas layanan perlu dilengkapi dengan indikator capaian literasi informasi dan keterlibatan kewarganegaraan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui tes atau tugas penelusuran informasi, analisis kasus, penilaian kualitas argumentasi dalam diskusi, refleksi mahasiswa, survei, serta dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki materi pelatihan, memilih sumber informasi, mengembangkan program, dan memperkuat kerja sama dengan dosen. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur kepuasan pemustaka, tetapi juga menilai kontribusi perpustakaan terhadap proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Kritis dan Berintegritas

Pengembangan literasi informasi dan *civic literacy* di lingkungan perpustakaan diharapkan mendukung pembentukan mahasiswa yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi informasi tidak hanya mampu menemukan sumber, tetapi juga memahami batasan informasi, menghargai hak kekayaan intelektual, menggunakan sitasi secara tepat, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Kompetensi tersebut merupakan bagian dari integritas akademik yang diperlukan dalam menghasilkan karya ilmiah dan berinteraksi di ruang digital.

Dalam konteks kewarganegaraan, kemampuan tersebut perlu disertai pemahaman terhadap persoalan publik, empati sosial, dan kesediaan menghargai perbedaan. Hylton (2018) menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan dan empati sosial berkaitan dengan tingkat keterlibatan kewarganegaraan mahasiswa. Sementara itu, Mulyoto et al. (2026) menegaskan pentingnya berpikir kritis dalam proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan keterlibatan kewarganegaraan. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan mahasiswa yang aktif dan bertanggung jawab membutuhkan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan analitis, dan kepekaan sosial.

Berdasarkan sintesis tersebut, kontribusi utama perpustakaan dalam model integrasi ini adalah menyediakan ekosistem yang menghubungkan sumber informasi, pembelajaran literasi, pemahaman isu publik, dialog kritis, dan partisipasi sosial. Perpustakaan tidak secara langsung menjamin terbentuknya karakter atau perilaku kewarganegaraan mahasiswa, tetapi dapat menyediakan kondisi pembelajaran yang mendukung proses tersebut melalui layanan, koleksi, pendampingan pustakawan,

dan kolaborasi kelembagaan. Dengan demikian, model integrasi perpustakaan perguruan tinggi, literasi informasi, dan *civic literacy* menempatkan perpustakaan sebagai mitra strategis pendidikan tinggi dalam membangun mahasiswa yang mampu menggunakan pengetahuan secara kritis, etis, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Perpustakaan perguruan tinggi memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai ruang literasi kewarganegaraan mahasiswa di era digital. Perubahan lingkungan informasi menuntut perpustakaan tidak hanya menyediakan sumber informasi, tetapi juga berperan dalam membangun kemampuan mahasiswa untuk menemukan, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa literasi informasi dapat menjadi fondasi penting dalam pengembangan civic literacy. Mahasiswa yang mampu mengevaluasi informasi memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami isu publik, membentuk pendapat, berdialog, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Nilai-nilai Pancasila memberikan dimensi etis dan kebangsaan terhadap proses tersebut. Pancasila dapat menjadi kerangka dalam menentukan bagaimana informasi diperoleh, dievaluasi, digunakan, dan dikomunikasikan. Penelitian ini menawarkan model konseptual Perpustakaan sebagai Civic Learning Space, dengan alur perpustakaan sebagai penyedia akses informasi, pengembangan literasi informasi, penguatan civic literacy, internalisasi nilai Pancasila, dan pembentukan civic engagement.

Implementasinya dapat dilakukan melalui pengembangan Civic Information Corner, program cek fakta akademik, Pancasila Reading Forum, digital civic literacy, dan Civic Literacy Week. Program tersebut membutuhkan kolaborasi antara pustakawan, dosen Pancasila/PPKn, pengelola program studi, dan mahasiswa. Dengan demikian, perpustakaan perguruan tinggi dapat bertransformasi dari pusat sumber informasi menjadi ruang intelektual, ruang dialog, dan ruang kewarganegaraan yang berkontribusi terhadap pembentukan mahasiswa yang kritis, demokratis, beretika, dan bertanggung jawab.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan *civic literacy* mahasiswa melalui penguatan literasi informasi. Kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami isu publik, membangun argumentasi, berdialog, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila memberikan landasan etis dalam keseluruhan proses tersebut, terutama dalam membangun sikap demokratis, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan model **Perpustakaan sebagai Civic Learning Space**, yang mengintegrasikan akses informasi, literasi informasi, pemahaman *civic literacy*, internalisasi nilai Pancasila, dialog kritis, dan *civic engagement*. Secara praktis, model ini dapat diterapkan melalui *Civic Information Corner*, Cek Fakta Akademik, *Pancasila Reading Forum*, *Digital Civic Literacy*, dan *Civic Literacy Week* dengan melibatkan pustakawan, dosen, pengelola program studi, serta mahasiswa. Implementasinya memerlukan dukungan kebijakan institusi, peningkatan kompetensi pustakawan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap capaian literasi informasi serta keterlibatan kewarganegaraan mahasiswa.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menguji penerapan model tersebut secara empiris pada berbagai perguruan tinggi dengan mempertimbangkan karakteristik institusi dan kemampuan literasi digital mahasiswa. Pengujian dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran untuk mengukur hubungan antara literasi informasi, *civic literacy*, internalisasi nilai Pancasila, dan *civic engagement*. Dengan demikian, efektivitas model dapat dinilai dan dikembangkan menjadi strategi penguatan peran perpustakaan dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

REFERENSI

Association of College and Research Libraries. (2016). *Framework for information literacy for higher education*. American Library Association.

Indrayati, T., Anggara, U. E., Afriani, W., & Liswati, K. N. (2026). Strengthening student citizenship literacy in the digital era through Pancasila education. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 6*(1).

Khriswina, S. A., Wibowo, S. E., & Sartono, E. K. E. (2025). Civic education in digital era: Implementing Pancasila values for Generation Z college students. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 17*(1).

Kranich, N. (2024). Civic literacy: Reimagining a role for libraries. *The Library Quarterly, 94*(1), 4–34. https://doi.org/10.1086/727809

Lovelinessia, D., & Rahmah, E. (2026). Information literacy skills of library users in utilizing digital information resources at the Library of Universitas Negeri Padang in 2025. *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS, 4*(2).

Mulyoto, G. P., Wibowo, A. M., Miftahusyai'an, M., Basori, & Fuad, V. (2026). The differential effects of critical thinking and digital literacy on civic engagement in project-based civic learning: Evidence from Indonesian higher education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 23*(2).

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2023). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 19*(2).

Santoso, A. P. A., Wassalwa, M., & Jayati, A. N. A. (2025). Civic literacy development through Pancasila-based learning strategies to enhance students' political awareness and democratic participation in higher education. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(3), 12–22.

Septiono, T., Hifzhillah, A., & Sutisna, A. (2026). Civic literacy for sustainable futures: Insights from a systematic review. *Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 18*(1).

Subekti, E. P., Rezi, & Pohan, A. A. (2026). Reconceptualizing civic education in the digital era: A Pancasila-based framework for developing critical thinking, ethical awareness, and national identity among students. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(2).

Sung, S. (2026). From exhibit to engagement: Civic literacy programming in academic libraries. *Journal of Library Outreach and Engagement, 5*.

Sutisna, A., Wulansari, R. D., Garadian, E. A., & Adiyatama, S. (2026). Strategies for enhancing students civic literacy through the revitalization of Pancasila education in higher education. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 6*(2), 252–263. https://doi.org/10.52738/pjk.v6i2.888

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Andres, A. J., & Usova, T. (2024). A conceptual analysis of collaboration in information literacy librarianship. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(5), Article 102934. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102934

Association of College and Research Libraries. (2016). *Framework for information literacy for higher education*. American Library Association. https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

De Paor, S., & Heravi, B. (2020). Information literacy and fake news: How the field of librarianship can help combat the epidemic of fake news. *The Journal of Academic Librarianship*, 46(5), Article 102218. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102218

Hylton, M. E. (2018). The role of civic literacy and social empathy on rates of civic engagement among university students. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 22(1), 87–106. https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/article/view/1373

Kranich, N. (2024). Civic literacy: Reimagining a role for libraries. *The Library Quarterly*, 94(1), 4–34. https://doi.org/10.1086/727809

Madani, Z. A., Anwar, R. K., & Winoto, Y. (2025). Information literacy in the era of misinformation: A bibliometric mapping of educational strategies and interventions 2018–2024. *Informasi,* 55(2), 144–162. https://doi.org/10.21831/informasi.v55i2.80012

Muhajir, M., Latief, A., & Tiara, M. (2025). Strengthening digital literacy and political culture for Gen-Z through Pancasila education learning in higher education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 524–534. https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.89956

Mulyoto, G. P., Wibowo, A. M., Miftahusyai'an, M., Basori, & Fuad, V. (2026). The differential effects of critical thinking and digital literacy on civic engagement in project-based civic learning: Evidence from Indonesian higher education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(2), 807–822. https://doi.org/10.21831/jc.v23i2.96905

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*, 18(3), e1003583. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sung, S. (2025). From exhibit to engagement: Civic literacy programming in academic libraries. *Journal of Library Outreach and Engagement*, 5(1), 8–15. https://doi.org/10.21900/j.jloe.v5.2074

Sutisna, A., Wulansari, R. D., Garadian, E. A., & Adiyatama, S. (2026). Strategies for enhancing students civic literacy through the revitalization of Pancasila education in higher education. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(2), 252–263. https://doi.org/10.52738/pjk.v6i2.888

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, Article 45. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45

Tiara, M., Irwan, I., & Muhajir, M. (2024). Penguatan civic literacy dalam membentuk ketahanan guru PPKn. *Journal of Civic Education*, 7(1), 37–47. https://doi.org/10.24036/jce.v7i1.1091

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. https://doi.org/10.1177/0739456X17723971

Yap, J. M., Hajdu Barat, A., & Kiszl, P. (2024). Civic roles of libraries in combating information disorders in social media: A scoping review. *Education for Information*, 40(1), 21–44. https://doi.org/10.3233/EFI-220038